

# ANALISIS KEBIJAKAN PEMERITAH TERKAIT MUTU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMAJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Pujiati<sup>1)</sup>, Helmiati<sup>2)</sup>, Hariza Hasyim<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Indonesia

Email: [pujiatiriau@gmail.com](mailto:pujiatiriau@gmail.com)<sup>1</sup>, [helmiati@uin-suska.ac.id](mailto:helmiati@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [hariza.hasyim@uin-suska.ac.id](mailto:hariza.hasyim@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>

## Info Artikel

## Abstract

**Keywords:** Government Policy, Education Quality, Implications, Progress of Islamic Education.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Mutu Pendidikan, Implikasi, Kemajuan Pendidikan Islam

*Education is an important process in shaping a person's character, knowledge, and skills to face life's challenges. This study aims to analyze government policies related to improving the quality of national education, particularly in the field of Islamic Religious Education (PAI). In addition, this study examines the extent to which the implementation of these policies has an impact on the progress and development of Islamic Religious Education in Indonesia. The research method used is a literature study, which is a data collection technique through various relevant literature. The analytical approach used is content analysis with a descriptive-analytical nature through the activities of reading, examining, and referring to literature on an ongoing basis. The Indonesian government continues to make various efforts to improve the quality of national education in order to produce superior human resources. In conclusion, the policy of improving the quality of national education has positive implications for the development of Islamic Religious Education, both in terms of learning, curriculum, student character, and institutions. If implemented consistently and inclusively, Islamic Religious Education can become a major force in shaping a religious, tolerant, and globally competitive generation.*

### Abstrak

Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI). Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang relevan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah content analysis dengan sifat deskriptif-analitis melalui kegiatan membaca, menelaah, dan merujuk literatur secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional demi mencetak sumber daya manusia unggul. Kesimpulannya, kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional memberikan implikasi positif terhadap perkembangan Pendidikan Agama Islam baik dalam pembelajaran, kurikulum, karakter peserta didik, maupun kelembagaan. Jika diimplementasikan secara konsisten dan inklusif, PAI dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk generasi religius, toleran, dan berdaya saing global.

# ANALISIS KEBIJAKAN PEMERITAH TERKAIT MUTU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMAJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan seseorang untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan kepribadian yang utuh melalui pengalaman belajar yang terarah dan berkesinambungan.

Melalui pendidikan, individu memperoleh tidak hanya pemahaman akademik, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan budaya. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi dalam membentuk pribadi yang memiliki integritas, kepekaan sosial, serta kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan generasi yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangatlah penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Tilaar, 2002).

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Mutu Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan di Indonesia antara lain Adalah penelitian Sofia Putri Wulandari dkk (2024) dengan judul “ Implikasi Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Reformasi” menyatakan bahwa Pendidikan Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini tercermin dari ketergantungan kebijakan pendidikan Islam pada arah kebijakan nasional. Seiring perjalanan waktu, pendidikan Islam terus mengalami perkembangan, dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan situasi negara pada masanya. Memasuki era Reformasi, pendidikan Islam mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Pendidikan Islam tidak lagi terpaku pada ranah nasional, tetapi telah berintegrasi dengan dunia internasional untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara(Wulandari dkk., 2024).

Penelitian yang di lakukan oleh Tengku Darmansah dkk (2025) dengan judul “ Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam “ mengatakan Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan tahap penting dalam siklus Kebijakan, tetapi juga merupakan langkah kritis yang menentukan keberhasilan atau Kegagalan suatu kebijakan. proses implementasi harus memperhatikan integrasi antara berbagai sistem yang Terlibat, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan. Terutama dalam konteks Pendidikan, implementasi kebijakan harus dihindari dari masalah seperti kehilangan arah Dari perencanaan pusat dan hambatan teknis yang mungkin muncul di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2002) bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik bangsa..

Meskipun banyak penelitian yang mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Mutu Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan (Wulandari dkk., 2024), tetapi belum ada yang spesifik mengkaji Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Mutu Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Mujib (2017) yang menyoroti pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter bangsa, serta Zuhairini (2019) yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), serta mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional, dengan fokus pada bidang Pendidikan Agama Islam (PAI). Berbagai kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, digitalisasi pendidikan, dan program Madrasah

Reform menjadi titik kajian utama dalam melihat arah transformasi pendidikan yang lebih berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berdampak pada kemajuan dan perkembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Dampak yang ditelaah mencakup aspek kurikulum, metode pembelajaran, penguatan karakter, serta penguatan kelembagaan, khususnya madrasah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi kebijakan nasional terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional?
2. Bagaimana implikasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan agama Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan **studi pustaka** sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mempelajari serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penelitian sebelumnya sekaligus menjadi dasar dalam mengkaji isu yang sedang diteliti (Mansyur & Ulya, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis isi (content analysis)** yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendalami isi dan materi dari berbagai literatur secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang kredibel, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen kebijakan pemerintah (Krippendorff, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai referensi yang membahas topik serupa, khususnya mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada telaah teori, tetapi juga pada relevansi praktik implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam konteks pendidikan agama Islam di Indonesia (Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional**

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu bentuk kebijakan strategis adalah sebagai berikut :

#### **a. Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan baru pemerintah yang memberikan fleksibilitas lebih luas kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pada penguatan kompetensi dasar siswa, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi sesuai minat dan bakat peserta didik (Anwar, 2022). Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang relevan dengan isu-isu aktual, seperti lingkungan hidup, kesehatan, dan budaya, sehingga siswa tidak hanya menguasai pengetahuan kognitif, tetapi juga memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas (Nurhayati, 2022). Menurut Kemendikbudristek (2022), dengan

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERITAH TERKAIT MUTU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMAJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

pendekatan tersebut, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter bangsa.

### b. Program Merdeka Belajar

Program *Merdeka Belajar* merupakan kebijakan transformasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah melalui Kemendikbudristek sejak 2019. Salah satu langkah penting dari program ini adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penggantinya dengan Asesmen Nasional (AN), yang lebih menekankan pada pengukuran kualitas pendidikan secara menyeluruh (Kemendikbudristek, 2020). Asesmen Nasional terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan numerasi, Survei Karakter yang menilai profil nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, serta Survei Lingkungan Belajar yang memotret kualitas proses pembelajaran di sekolah (Susanti, 2021).

### c. Guru Penggerak

Program *Guru Penggerak* merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, reflektif, dan berorientasi pada kebutuhan murid. Melalui program ini, guru dibekali dengan pelatihan kepemimpinan, keterampilan pedagogik, serta kemampuan mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan berpihak pada peserta didik (Kemendikbudristek, 2020). Selain itu, pemerintah juga menyinergikan program ini dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai sarana pelatihan dan sertifikasi yang bertujuan memastikan profesionalisme guru sesuai standar nasional. Dengan demikian, Guru Penggerak diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di sekolah serta menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas (Rahardjo, 2022).

### d. Platform Merdeka Mengajar.

Platform Merdeka Mengajar merupakan inovasi digital yang dikembangkan pemerintah melalui Kemendikbudristek sebagai sarana pendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, seperti akses ke modul pelatihan, video pembelajaran, dan referensi materi ajar yang relevan (Kemendikbudristek, 2021). Dengan adanya platform ini, guru dapat belajar secara mandiri maupun kolaboratif, serta memperoleh ruang untuk mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Pratama, 2022).

Selain itu, Platform Merdeka Mengajar juga menjadi wadah berbagi praktik baik antar guru, sehingga terbentuk komunitas belajar yang saling mendukung dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas (Rahmawati, 2022). Akses digital yang mudah diharapkan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya di daerah, terutama bagi guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dengan demikian, platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran digital, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman (Hidayat, 2023).

### e. Dalam menghadapi tantangan era digital

Dalam menghadapi tantangan era digital, pemerintah Indonesia terus mendorong program digitalisasi sekolah sebagai salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan. Program ini mencakup penyediaan perangkat teknologi, akses internet, serta pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara efektif (Kemendikbudristek, 2021). Melalui digitalisasi, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada metode konvensional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital seperti Learning Management System (LMS), aplikasi pembelajaran, dan media interaktif yang mampu meningkatkan pengalaman belajar siswa (Hidayat, 2022). Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber belajar yang lebih variatif dan modern.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pemerataan digitalisasi sekolah, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Akses internet dan perangkat teknologi menjadi prioritas agar kesenjangan pendidikan antara kota dan desa dapat diminimalkan (Rahmawati, 2022). Dengan dukungan infrastruktur digital, sekolah di daerah terpencil dapat terhubung dengan sumber belajar global, sementara guru dan siswa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses materi ajar berbasis teknologi. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berdaya saing di era digital (Sutarto, 2023).

f. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan secara berkelanjutan. Melalui pemberian bantuan tunai pendidikan, PIP membantu meringankan beban biaya sekolah, termasuk kebutuhan buku, seragam, dan transportasi, sehingga anak-anak tidak terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi (Kemendikbudristek, 2021). Program ini menjadi upaya strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun, sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi (Suryana, 2022).

g. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Revitalisasi pendidikan vokasi, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Melalui program SMK Pusat Keunggulan, pemerintah berupaya memperkuat peran SMK dengan memberikan dukungan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan vokasi tidak hanya menyiapkan tenaga kerja terampil, tetapi juga mendorong lahirnya wirausahawan muda yang mampu beradaptasi di era persaingan global (Kemendikbudristek, 2021).

Selain itu, program SMK Pusat Keunggulan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kerja sama ini diwujudkan melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, program magang, hingga rekrutmen tenaga kerja langsung dari lulusan SMK. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dengan tuntutan pasar kerja, sekaligus menjadikan SMK sebagai pusat pengembangan keterampilan masa depan. Dengan strategi tersebut, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi langkah strategis untuk menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja (Wardhani, 2022). Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah tanah air.

## **2. Implikasi kebijakan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan nasional terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan agama Islam**

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional telah membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Sejak diterapkannya kebijakan strategis seperti Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, dan Asesmen Nasional, pendidikan agama Islam mengalami transformasi signifikan baik dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, maupun penguatan kelembagaan (Kemendikbudristek, 2022). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari arah pembangunan pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERITAH TERKAIT MUTU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMAJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Salah satu dampak nyata dari kebijakan tersebut adalah adanya penyesuaian kurikulum pendidikan agama Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Melalui Kurikulum Merdeka, guru diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan materi ajar secara kontekstual. Materi pendidikan agama Islam tidak lagi terbatas pada hafalan dan pemahaman doktrin semata, melainkan juga menekankan pada pembentukan karakter peserta didik yang moderat, toleran, serta berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air (Abdullah, 2021).

Selain itu, implementasi Asesmen Nasional turut mendorong peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Melalui komponen seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, kualitas pendidikan agama Islam dapat diukur secara lebih holistik. Penilaian ini tidak hanya menyoroti aspek kognitif, tetapi juga menekankan dimensi sikap, nilai, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan spiritual peserta didik (Suryana, 2022). Dengan demikian, pendidikan agama Islam semakin diarahkan untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter mulia.

Di samping itu, kebijakan penguatan guru seperti program Guru Penggerak dan Platform Merdeka Mengajar juga memberi dampak positif pada guru pendidikan agama Islam. Guru didorong untuk lebih inovatif, reflektif, serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran (Fauzi, 2023). Hal ini berkontribusi pada terciptanya pembelajaran agama Islam yang lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan era digital. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan agama Islam di Indonesia diharapkan semakin mampu melahirkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global.

Kebijakan Asesmen Nasional (AN) yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, membawa implikasi penting terhadap pendidikan agama Islam. Survei karakter, misalnya, mendorong guru pendidikan agama Islam untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, serta toleransi antarumat beragama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama (Suryana, 2022).

Selain itu, kebijakan digitalisasi pendidikan menuntut guru pendidikan agama Islam untuk beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka kini didorong untuk menggunakan media pembelajaran digital seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran daring, hingga platform *Merdeka Mengajar* yang menyediakan materi ajar serta pelatihan berbasis kompetensi (Kemendikbudristek, 2022). Perubahan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus menjadi tantangan bagi guru yang sebelumnya belum terbiasa dengan teknologi.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan juga membawa pengaruh yang signifikan pada aspek kelembagaan, terutama di lingkungan madrasah. Melalui program Madrasah Reform yang dijalankan oleh Kementerian Agama, pemerintah berupaya melakukan modernisasi madrasah agar mampu bersaing dengan sekolah umum. Upaya ini mencakup pengembangan kurikulum yang lebih relevan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Reformasi ini diharapkan dapat menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang profesional, responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap menjaga kekhasan nilai keagamaannya (Kemenag RI, 2021).

Selain peningkatan kelembagaan, kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru di madrasah. Guru pendidikan agama Islam didorong untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan, memperoleh sertifikasi profesi, serta menguasai berbagai pendekatan pembelajaran modern. Langkah ini bertujuan agar guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik (Fauzi, 2023).

Program Madrasah Reform juga menitikberatkan pada kemampuan guru untuk beradaptasi dengan tuntutan abad ke-21. Guru dituntut tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, pembelajaran agama Islam di madrasah dapat lebih kontekstual, menarik, dan mampu menjawab tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar pendidikan Islam.

Pada akhirnya, reformasi madrasah melalui program ini berperan penting dalam menyelaraskan mutu pendidikan agama Islam dengan standar pendidikan nasional. Dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi guru, madrasah diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan alternatif, melainkan juga pilar utama dalam mencetak generasi bangsa yang religius, moderat, adaptif, serta siap bersaing di era modern.

Namun, implementasi kebijakan nasional dalam konteks pendidikan agama Islam masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Banyak madrasah di daerah terpencil yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai, mulai dari keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat teknologi, hingga minimnya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam mengelola pembelajaran berbasis digital (Zamroni, 2020). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang cukup signifikan dalam mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain hambatan infrastruktur, tantangan lain yang muncul adalah rendahnya kesiapan sumber daya manusia, terutama guru pendidikan agama Islam. Tidak semua guru memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Padahal, di era digitalisasi pendidikan, kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kesenjangan kompetensi guru ini juga berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan antarwilayah.

Meskipun demikian, kebijakan nasional seperti Asesmen Nasional, digitalisasi pendidikan, dan Madrasah Reform tetap membawa dampak positif terhadap perkembangan pendidikan agama Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, tanpa pemerataan implementasi di seluruh wilayah Indonesia, tujuan besar peningkatan mutu pendidikan akan sulit tercapai secara menyeluruh (Abdullah, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini. Dukungan infrastruktur pendidikan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan langkah-langkah yang terarah, pendidikan agama Islam tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang luhur, sehingga dapat melahirkan generasi yang religius, moderat, dan berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional memberikan implikasi yang positif terhadap perkembangan pendidikan agama Islam. Berbagai kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, digitalisasi pendidikan, hingga program Madrasah Reform telah memberikan arah baru dalam pembelajaran agama Islam. Transformasi ini mencakup aspek pembelajaran, kurikulum, serta penguatan karakter peserta didik.

Penerapan kebijakan tersebut juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui integrasi teknologi dan metode pembelajaran kontekstual, pendidikan agama Islam tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi berkembang menjadi wadah untuk menumbuhkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERITAH TERKAIT MUTU PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMAJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Selain itu, penguatan kelembagaan pendidikan agama Islam, khususnya madrasah, menjadi salah satu fokus penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Modernisasi madrasah melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan media digital menjadikan pendidikan agama Islam semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, nilai-nilai dasar keislaman tetap dijaga agar pembelajaran tidak kehilangan jati diri dalam membentuk generasi berkarakter.

Apabila kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten, merata, dan inklusif, maka pendidikan agama Islam berpotensi menjadi kekuatan utama dalam membentuk generasi bangsa yang religius, moderat, toleran, dan berdaya saing global. Dengan langkah yang terarah, pendidikan agama Islam bukan hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi tantangan global di era modern.

### REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, M. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145–156.
- Darmansah, T., dkk. (2025). Kebijakan pendidikan dan tantangan implementasinya di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 15(2), 101–118.
- Fauzi, A. (2021). Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Sistem Evaluasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(2), 101–112.
- Fauzi, A. (2023). Inovasi Guru Pendidikan Agama Islam melalui Program Guru Penggerak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 55–68.
- Hidayat, R. (2022). Transformasi Pendidikan di Era Digital melalui Program Digitalisasi Sekolah. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 9(2), 115–127.
- Hidayat, R. (2023). Transformasi Digital Pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(1), 77–88.
- Kemendikbudristek. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar dan Implementasi Asesmen Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Penggunaan Platform Merdeka Mengajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemenag RI. (2021). *Madrasah Reform: Transformasi Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mansyur, A., & Ulya, I. (2023). *Metode penelitian kepustakaan dalam studi pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mujib, A. (2017). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, S. (2022). Kurikulum Merdeka sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 55–67.

Pujiati, Helmiati, Hariza Hasyim

- Pratama, A. (2022). Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 7(2), 134–142.
- Rahardjo, S. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(1), 45–58.
- Rahmawati, D. (2022). Asesmen Nasional sebagai Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(1), 33–45.
- Rahmawati, D. (2022). Peran Platform Digital dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(3), 201–212.
- Rahmawati, D. (2022). Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Digitalisasi di Daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(1), 67–79.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, L. (2021). *Transformasi Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, A. (2023). *Digitalisasi Pendidikan: Peluang dan Tantangan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryana, D. (2022). Asesmen Nasional dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 101–115.
- Suryana, D. (2022). Program Indonesia Pintar dalam Perspektif Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 134–145.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wardhani, N. (2022). Revitalisasi Pendidikan Vokasi dalam Menyongsong Dunia Kerja 4.0. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 12(1), 45–56.
- Wulandari, S. P., dkk. (2024). Implikasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 12(1), 45–60.
- Zamroni, Z. (2020). Tantangan Digitalisasi Pendidikan di Wilayah 3T. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(4), 367–378.
- Zuhairini. (2019). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.